



# LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2018**



**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2019**



## KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2018.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2018 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis,      Februari 2019

**Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Bengkalis**



**Drs. YUHELMI**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19620612 199203 1 004**





## RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu yang mempunyai tugas urusan penunjang perencanaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu. Bappeda Kabupaten. Selain tugas tersebut, Bappeda Kabupaten Bengkulu juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dilingkungan perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2018 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2018, Bappeda Kabupaten Bengkulu terdapat 3 (tiga) sasaran dan terdapat 6 (enam) indikator untuk menilai realisasi dan capaian ditahun 2018.

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu belum tercapai, yaitu dari 6 (enam) indikator kinerja terdapat 2 (dua) indikator yang telah mencapai target, sementara itu 4 (empat) indikator lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun 4 (empat) indikator yang





## LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2018



belum mencapai target yaitu Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD, Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah, Predikat kinerja RKPD dan Persentase pemenuhan data pembangunan, hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan.

Meskipun masih terdapat indikator yang belum mencapai target, tapi jika dilihat dari skala penilaian terdapat 2 (dua) indikator dengan skala penilaian  $91\% \leq 100\%$  yang mendapat predikat Sangat Tinggi dan 4 (empat) indikator lainnya dengan skala penilaian yang mendapat predikat Tinggi. Adapun capaian rata-rata keseluruhan sebesar 96,24 %. Untuk itu, ditahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk berusaha meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
1.3. Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Struktur Organisasi .....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	7
3.1. Pengukuran Kinerja .....	7
3.2. Analisis Kinerja .....	9
3.3. Realisasi Anggaran.....	18
3.3. Analisis Efisiensi.....	18
BAB IV PENUTUP .....	20





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap tahunnya daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah). Penyusunan dokumen ini sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja tahunan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja ini, yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan kinerja tahun 2018 ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan ditandatangani pada tahun 2018 oleh Kepala Perangkat Daerah. Laporan kinerja ini nantinya akan disampaikan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja tahun 2018.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan





Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan ditahun 2018. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

### **1.3. Tugas dan Fungsi**

Bappeda Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Selain tugas tersebut, Bappeda Kabupaten Bengkalis juga mempunyai fungsi, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dilingkungan perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

### **1.4. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Bengkalis, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata;
  - 2) Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Kependudukan; dan





- 3) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - 2) Sub Bidang Penanaman Modal dan Pengelolaan Keuangan; dan
  - 3) Sub Bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan.
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
  - 2) Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Wilayah; dan
  - 3) Sub Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Data;
  - 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan; dan
  - 3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan fungsional.

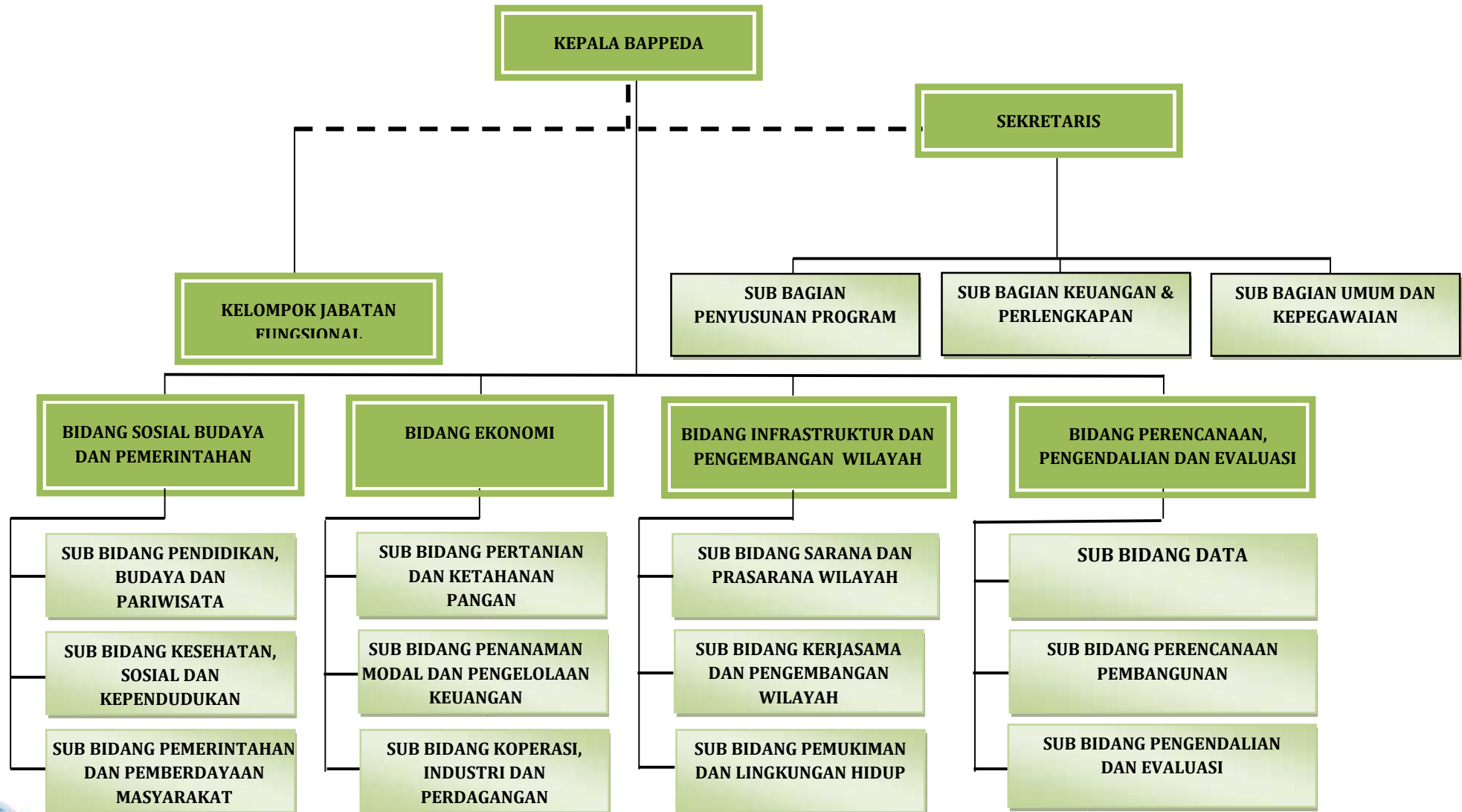
Adapun struktur organisasi Bappeda Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada bagan berikut.





Gambar 1.1

Bagan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis





## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018.

#### A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	90%	95%	98%	100%	100%	100%
	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	80%	88%	92%	96%	100%	100%
	Predikat kinerja RKPD	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase pemenuhan data pembangunan	9,15%	30%	40%	50%	60%	70%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	CC	B	BB	BB	A	A
	Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%



## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	98%
	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	92%
Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Predikat kinerja RKPD	Tinggi
	Persentase pemenuhan data pembangunan	40%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	BB
	Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	100%





## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2018. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

#### **3.1. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang tidak baik. Adapun skala penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut.





Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sedang Rendah

Adapun target dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2  
Realisasi Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	98	81,51	83,17
	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	%	92	82,53	88,29
	Predikat kinerja RKPD	Nilai	Tinggi (76)	Sedang (70,59)	92,88
Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase pemenuhan data pembangunan	%	40	35	87,50
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	BB (70)	B (65,08)	92,97
	Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100





### 3.2. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 3 (tiga) sasaran dan 6 (enam) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan dengan predikat “Sangat Tinggi” dan “Tinggi”.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

#### Sasaran 1

##### Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 3 (tiga) indikator kinerja mendapatkan rata-rata capaian sebesar 88,12 % dengan predikat Tinggi.

Tabel 3.3  
Realisasi Indikator Sasaran 1

Indikator	Satuan	2017	2018		Target Tahun 2021	Capaian 2018 terhadap 2021	
		Capaian	Target	Realisasi			Capaian
Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	93,57	98	81,51	83,17	100	83,17
Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	%	109,11	92	81,23	88,29	100	88,29
Predikat kinerja RKPD	%	100	Tinggi	Sedang	92,88	91	102,07
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>88,12</b>		



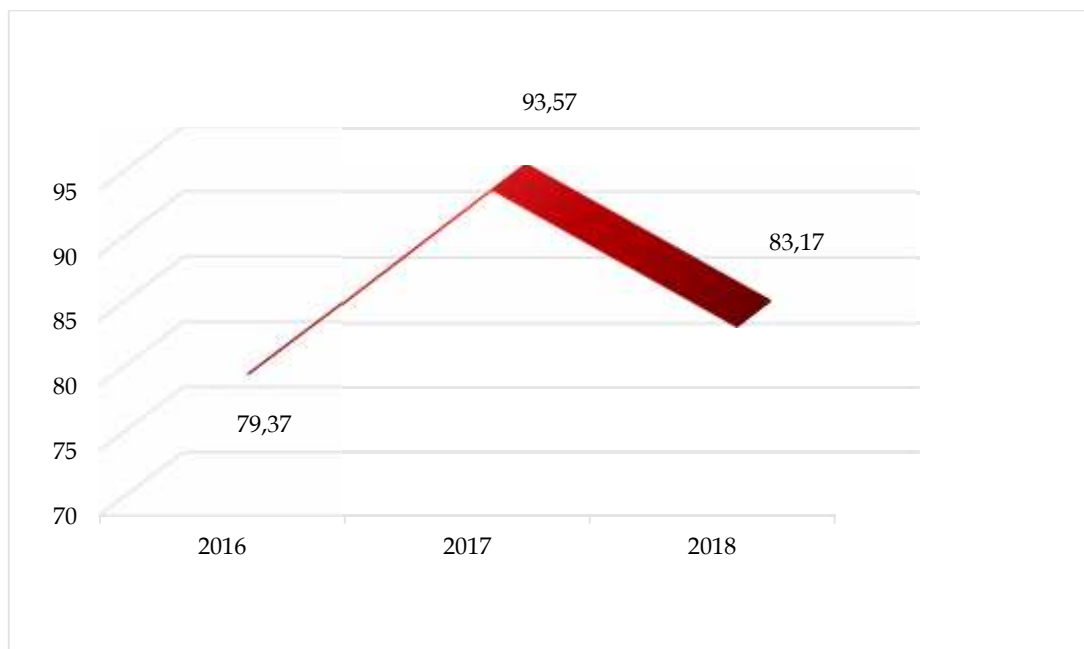


Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui realisasi dari 3 (tiga) indikator kinerja selama 2018 menunjukkan bahwa ketiga indikator kinerja tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja.

#### 1. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD

Capaian dari indikator persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD sebesar 83,17 % atau dengan predikat Tinggi dari target 98 % dengan realisasi 81,51%. Meskipun, mendapat predikat Tinggi, namun untuk capaian tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian 2017 yang mencapai 93,57. Dan untuk capaian tahun 2016 sebesar 79,37 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1  
Capaian Kinerja Indikator Persentase kesesuaian RKPD dengan  
RPJMD  
Tahun 2018



Meskipun indikator persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD mendapat predikat tinggi, namun pada realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan.



Faktor penyebab belum tercapainya target, yaitu :

- 1) Adanya perbedaan jumlah program pada RKPD Tahun 2018 dengan RPJMD untuk pelaksanaan tahun yang sama;
- 2) Terdapat beberapa program pada RPJMD yang tidak digunakan oleh beberapa Perangkat Daerah dikarenakan ketidaksesuaian dengan tupoksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

- 1) Melakukan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan antara dokumen RPJMD dengan RKPD khususnya terkait program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya;
- 2) Melakukan pendampingan secara berkala dan intens terhadap Perangkat Daerah dibawah koordinasi masing-masing bidang di Bappeda dalam perumusan perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

## 2. Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah

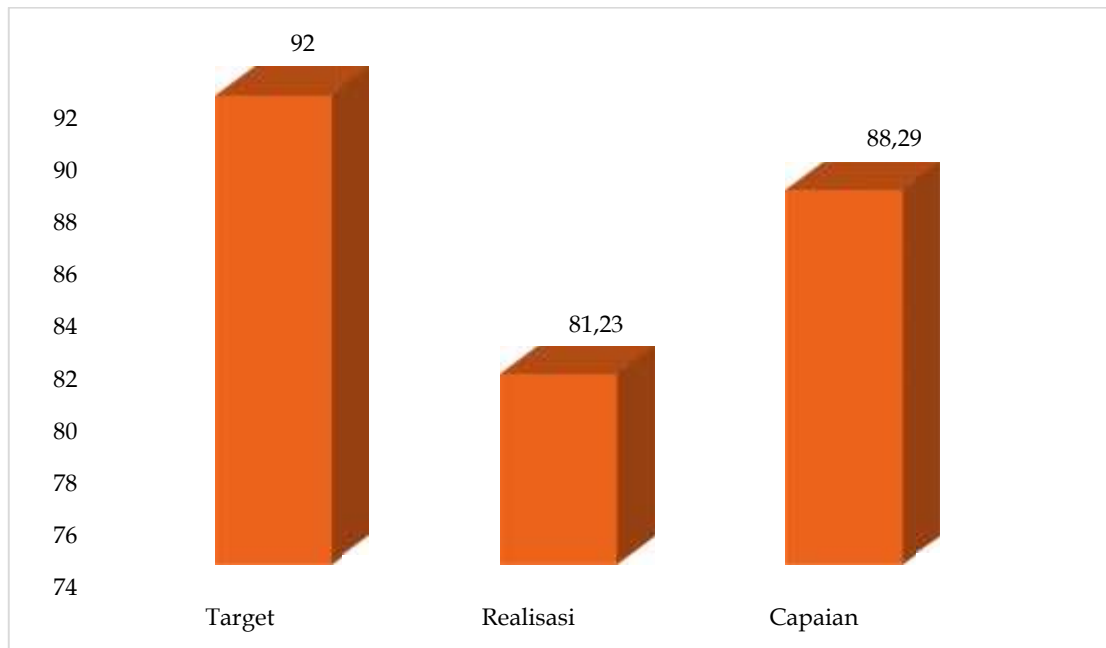
Capaian dari indikator persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah sebesar 88,29% atau dengan predikat Tinggi dari target 92 % dengan realisasi 81,23%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.







Gambar 3.2  
Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Renja Perangkat  
Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018



Faktor penyebab belum tercapainya target, yaitu :

- 1) Adanya kegiatan yang tidak sesuai atau berhubungan dengan tupoksi Perangkat Daerah;
- 2) Masih adanya beberapa Perangkat Daerah saat penyusunan rencana tahunan yang tidak mengacu pada dokumen Renstra yang disusun;
- 3) Terdapatnya beberapa kegiatan yang telah mencapai target kinerja sehingga tidak perlu dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

- 1) Setiap Perangkat Daerah dalam membuat perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya harus mengacu pada renstra dan jika terdapat kegiatan baru yang sebelumnya tidak tertuang dalam dokumen Renstra maka segera lakukan penyempurnaan Renstra sehingga nantinya semua kegiatan yang dilaksanakan telah tertuang pada renstra Perangkat Daerah;

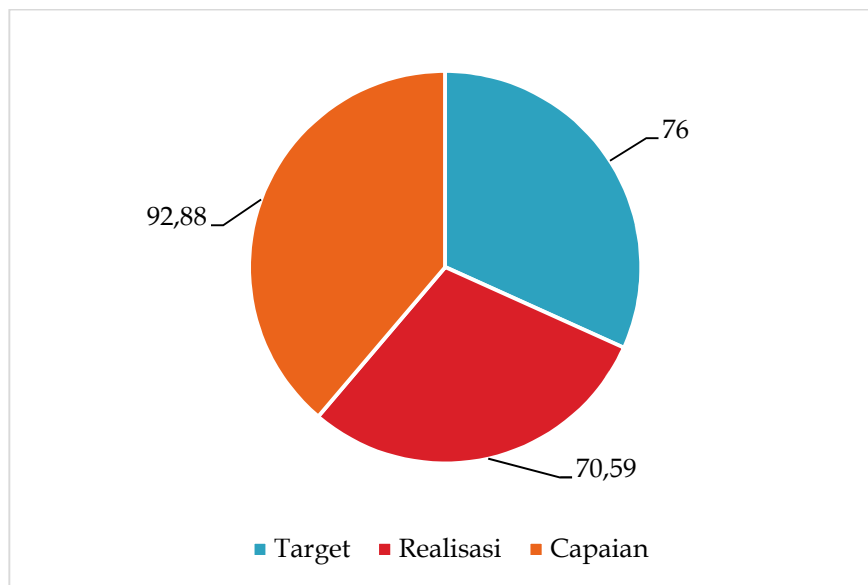


- 2) Dalam penyusunan perencanaan kegiatan sesuaikan dengan tupoksi masing-masing Perangkat Daerah dan juga lakukan koordinasi dengan bidang-bidang di Bappeda untuk mengetahui kesesuaian kegiatan tersebut;
- 3) Menginventarisir kegiatan yang telah mencapai target kinerja pada dokumen renstra sehingga memudahkan dalam penyusunan perencanaan ditahun berikutnya.

### 3. Predikat kinerja RKPD

Capaian dari indikator Predikat kinerja RKPD sebesar 92,88 % atau dengan predikat Sangat Tinggi dari target 76 % dengan realisasi 70,59 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.3  
Capaian Kinerja Indikator Predikat kinerja RKPD Tahun 2018



Faktor penyebab belum tercapainya target, yaitu :

- 1) Adanya Perangkat Daerah yang belum menyampaikan laporan renja per triwulan pada tahun 2018 ke Bappeda;

**Solusi/Strategi Pemecahan masalah**

- 1) Adanya ketepatan waktu penyampaian laporan renja per triwulan maupun bentuk laporan lainnya yang menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah;
- 2) Memberlakukan sanksi atau teguran bagi Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan segala bentuk laporan yang diminta.

**Sasaran 2****Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan**

Hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan rata-rata capaian sebesar 87,50 % dengan predikat Tinggi.

Tabel 3.4  
Realisasi Indikator Sasaran 2

Indikator	Satuan	2017	2018			Target Tahun 2021	Capaian 2018 terhadap 2021
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase pemenuhan data pembangunan	%	100	40	35	87,50	70	125
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>87,50</b>		

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian dari indikator persentase pemenuhan data pembangunan sebesar 87,50 % dari target 40 % dan realisasi 35 %. Dan jika dilihat realisasi tahun 2018 masih berada dibawah target tahun 2021. Adapun faktor yang menyebabkan belum tercapainya indikator persentase pemenuhan data pembangunan, yaitu :

- 1) Belum terpenuhinya pengisian data SIPD yang diinput oleh Perangkat Daerah;
- 2) Ketidaktahuan Perangkat Daerah terhadap substansi data SIPD.



**Solusi/Strategi Pemecahan masalah**

- 1) Melakukan komunikasi yang intensif dan secara berkala dengan Perangkat Daerah terkait penginputan data SIPD tersebut;
- 2) Mengadakan pertemuan rutin dengan Perangkat Daerah terkait sejauhmana kemajuan dalam penginputan data SIPD dan menjelaskan substansi data SIPD yang belum dipahami oleh Perangkat Daerah.

**Sasaran 3****Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja**

Hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja dengan 2 (dua) indikator kinerja mendapatkan rata-rata capaian sebesar 96,49 % dengan predikat Sangat Tinggi.

Tabel 3.5  
Realisasi Indikator Sasaran 3

Indikator	Satuan	2017	2018			Target Tahun 2021	Capaian 2018 terhadap 2021
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Nilai akuntabilitas kinerja	Angka	100	70	65,08	92,97	80	116,21
Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>96,49</b>		

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) indikator terdapat 1 (satu) indikator kinerja telah mencapai target dan 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja.

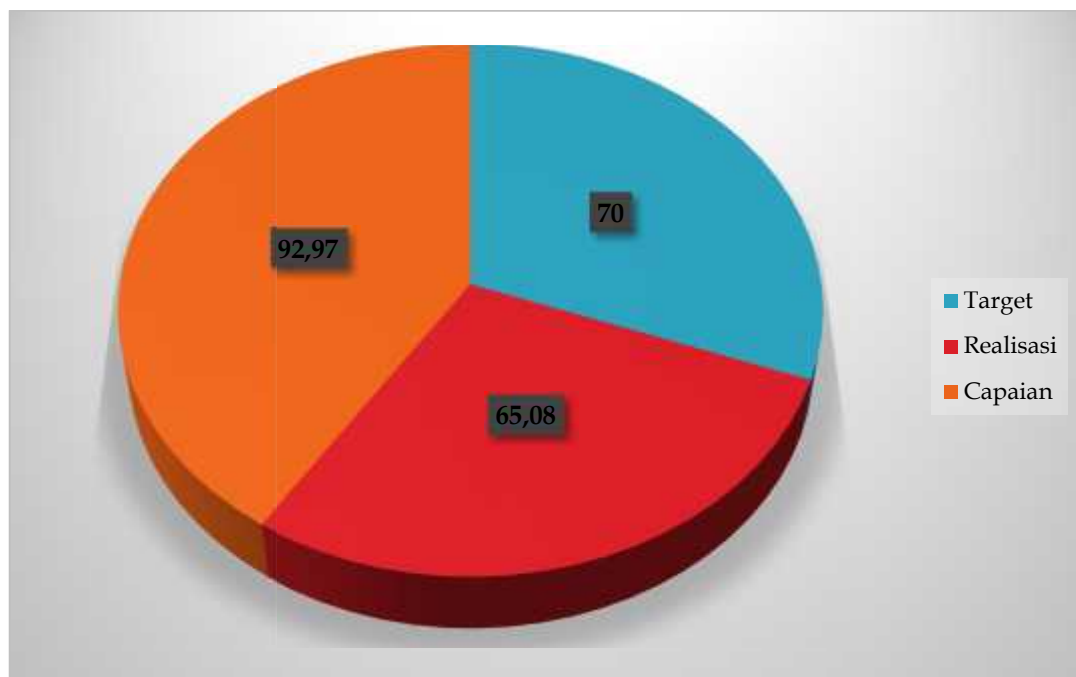


## 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Capaian dari indikator Nilai akuntabilitas kinerja sebesar 92,97 % atau dengan predikat Sangat Tinggi dari target 70 % dengan realisasi 65,08%. Jika dibandingkan antara target tahun 2021 dengan realisasi tahun 2018 indikator ini masih belum mencapai target tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.4

Capaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018



Faktor penyebab belum tercapainya target, yaitu :

- 1) Terdapatnya bobot penilaian Sakip yang belum tercapai;
- 2) Masih minimnya implementasi kinerja yang telah ditetapkan.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

- 1) Menindaklanjuti hasil penilaian Sakip tahun 2017 sebagai upaya untuk penyempurnaan penyusunan dokumen Lakip ditahun yang akan datang;
- 2) Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

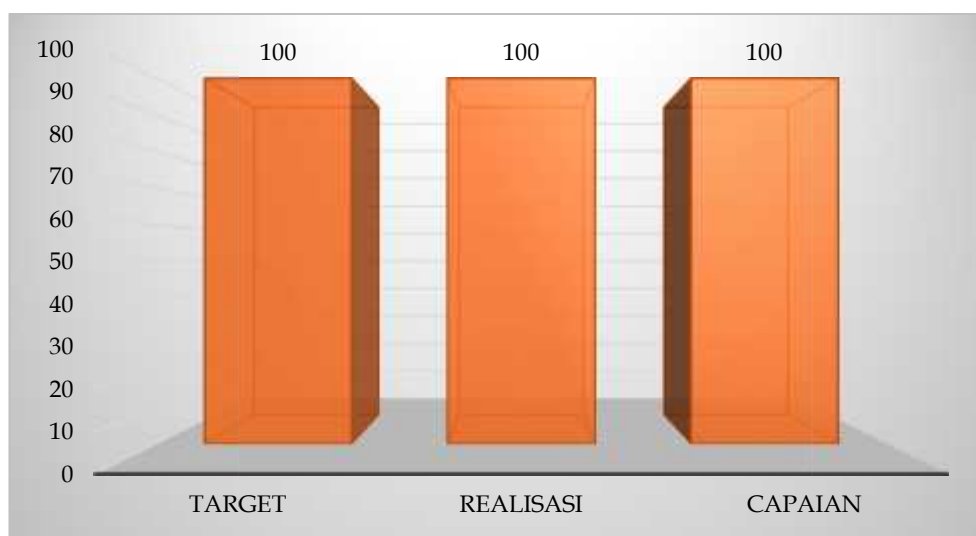


## 2. Persentase Temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti

Capaian dari indikator persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti sebesar 100 % atau dengan predikat Sangat Tinggi dari target 100 % dengan realisasi 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.5

Capaian Kinerja Indikator Persentase Temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti



Faktor yang mempengaruhi keberhasilan, yaitu :

1) Penyampaian laporan keuangan tepat waktu

Permasalahan/hambatan

1) Belum optimalnya ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien;

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

1) Segera menindaklanjuti setiap hasil temuan Inspektorat/BPK;

2) Mempelajari dan memahami hasil tindak lanjut tahun sebelumnya untuk dijadikan acuan dalam perbaikan penyusunan laporan keuangan.



### 3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2018 adalah sebesar 7.390.923.378,00 atau 71,27% dari pagu sebesar Rp. 10.370.557.415,00. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu sebesar 75,57 %. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan yaitu 28,45 %. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6  
Realisasi Anggaran Tahun 2018

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	88,12	5.385.957.600,00	4.070.200.615,00	75,57
Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	87,50	1.089.547.600,00	310.019.100,00	28,45
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	96,49	3.895.052.215,00	3.010.703.663,00	77,30
<b>Total</b>		<b>10.370.557.415,00</b>	<b>7.390.923.378,00</b>	<b>71,27</b>

### 3.4. Analisis Efisiensi

Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran terhadap sasaran, maka dapat dilakukan analisa efisiensi terhadap sasaran sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut ini.





## LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2018



Tabel 3.7  
Analisis Efisiensi Tahun 2018

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	88,12	75,57	24,43
2.	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	87,50	28,45	71,55
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	96,49	77,30	22,70







## **PENUTUP**

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis telah tercapai, yaitu dari 6 (enam) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Terdapat 2 (dua) indikator dengan skala penilaian  $91\% \leq 100\%$  yang mendapat predikat Sangat Tinggi dan 4 (empat) indikator lainnya dengan skala penilaian yang mendapat predikat Tinggi. Adapun capaian rata-rata keseluruhan sebesar 92,52 %. Meskipun mendapat predikat sangat tinggi dan tinggi, namun jika dilihat dari realisasi masing-masing indikator terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf. Namun demikian, untuk tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Adapun beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran sehingga seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan selesai tepat waktu;
2. Adanya upaya sinkronisasi antara dokumen perencanaan, khususnya antara dokumen perencanaan tingkat kabupaten dengan dokumen perencanaan internal Perangkat Daerah;





## LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2018



3. Peningkatan kualitas data perencanaan sebagai acuan dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah, dengan menghimpun data dari Perangkat Daerah teknis maupun BPS terkait data sectoral maupun yang bersifat makro;
4. Peningkatan kualitas aparatur perencana dengan melibatkan dan mengikutsertakan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pelatihan maupun bimtek terkait perencanaan.

